



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.142, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Bagi Hasil.
Cukai. Hasil Tembakau.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66/ PMK.07/2010
TENTANG
ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, telah dialokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, paling lambat pada tahun 2010 perlu mulai dilaksanakan penghitungan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada provinsi penghasil tembakau;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4755);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2010.
- (2) DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan/atau provinsi penghasil tembakau.

Pasal 2

- (1) DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2010 dialokasikan sebesar Rp1.118.500.000.000,00 (satu triliun seratus delapan belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) DBH CHT untuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- (3) DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi sementara untuk provinsi, dan kabupaten/kota yang pembagiannya di masing-masing daerah diatur oleh gubernur di daerah yang bersangkutan.
- (4) Alokasi sementara DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibagikan dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.
- (5) Pembagian alokasi sementara DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Tahun Anggaran 2010 per-provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal gubernur telah menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) kepada Menteri Keuangan maka rincian alokasi DBH CHT per-provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Gubernur yang telah menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali,

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

- (3) Dalam hal gubernur belum menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) kepada Menteri Keuangan maka total alokasi provinsi yang bersangkutan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Gubernur yang belum menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah menyampaikan pembagian alokasi DBH CHT provinsi, dan kabupaten/kota, sepanjang tidak melampaui Tahun Anggaran 2010, maka akan dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menambahkan rincian alokasi untuk provinsi dan kabupaten/kota bersangkutan.

Pasal 4

Penggunaan DBH CHT untuk provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran DBH CHT Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan secara triwulanan.
- (2) Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Triwulan Pertama sebesar 20% (dua puluh persen), Triwulan Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Triwulan Ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penetapan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Triwulan Keempat adalah sebesar selisih antara penetapan alokasi definitif DBH CHT dengan jumlah dana yang telah disalurkan selama Triwulan Pertama sampai dengan Triwulan Ketiga berdasarkan penetapan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan kepada provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2010

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 66/PMK.07/2010 TENTANG
 ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI
 HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 TAHUN ANGGARAN 2010

**ALOKASI SEMENTARA
 DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 TAHUN ANGGARAN 2010**

dalam rupiah

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
I	Total Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	2.781.180.440
II	Total Provinsi Sumatera Utara	10.387.046.342
1	Provinsi Sumatera Barat	1.369.705.031
2	Kab. Limapuluh Kota	470.936.143
3	Kab. Agam	72.089.739
4	Kab. Kepulauan Mentawai	72.089.739
5	Kab. Padang Pariaman	72.089.739
6	Kab. Pasaman	72.089.739
7	Kab. Pesisir Selatan	72.089.739
8	Kab. Sijunjung	72.089.739
9	Kab. Solok	404.461.742
10	Kab. Tanah Datar	420.415.599
11	Kota Bukit Tinggi	72.089.739
12	Kota Padang Panjang	72.089.739
13	Kota Padang	72.089.739
14	Kota Payakumbuh	434.596.804
15	Kota Sawahlunto	456.311.775
16	Kota Solok	72.089.739
17	Kota Pariaman	72.089.739
18	Kab. Pasaman Barat	72.089.739
19	Kab. Dharmasraya	72.089.739
20	Kab. Solok Selatan	72.089.739

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
III	Total Provinsi Sumatera Barat	4.565.683.440
1	Provinsi Jambi	637.306.745
2	Kab. Batanghari	63.730.674
3	Kab. Bungo	63.730.674
4	Kab. Kerinci	849.742.327
5	Kab. Merangin	63.730.674
6	Kab. Muaro Jambi	63.730.674
7	Kab. Sarolangun	63.730.674
8	Kab. Tanjung Jabung Barat	63.730.674
9	Kab. Tanjung Jabung Timur	63.730.674
10	Kab. Tebo	63.730.674
11	Kota Jambi	63.730.674
12	Kota Sungai Penuh	63.730.674
IV	Total Provinsi Jambi	2.124.355.812
1	Provinsi Sumatera Selatan	530.698.617
2	Kab. Lahat	35.379.908
3	Kab. Musi Banyuasin	35.379.908
4	Kab. Musi Rawas	35.379.908
5	Kab. Muara Enim	35.379.908
6	Kab. Ogan Komering Ilir	176.899.539
7	Kab. Ogan Komering Ulu	35.379.908
8	Kota Palembang	35.379.908
9	Kota Pagar Alam	35.379.908
10	Kota Lubuk Linggau	176.899.539
11	Kota Prabumulih	35.379.908
12	Kab. Banyuasin	35.379.908
13	Kab. Ogan Ilir	176.899.539
14	Kab. OKU Timur	35.379.908
15	Kab. OKU Selatan	318.419.170
16	Kab. Empat Lawang	35.379.908

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
V	Total Provinsi Sumatera Selatan	1.768.995.392
VI	Total Provinsi Lampung	2.059.947.542
VII	Total Provinsi DKI Jakarta	1.462.854.078
VIII	Total Provinsi Jawa Barat	69.555.868.846
IX	Total Provinsi Banten	2.962.898.419
1	Provinsi Jawa Tengah	77.581.295.272
2	Kab. Banjarnegara	2.551.582.288
3	Kab. Banyumas	2.404.333.430
4	Kab. Batang	2.777.810.760
5	Kab. Blora	3.157.602.260
6	Kab. Boyolali	4.496.944.487
7	Kab. Brebes	2.374.607.861
8	Kab. Cilacap	2.370.548.704
9	Kab. Demak	5.653.188.774
10	Kab. Grobogan	3.949.280.618
11	Kab. Jepara	7.532.926.260
12	Kab. Karanganyar	3.284.483.032
13	Kab. Kebumen	2.754.188.653
14	Kab. Kendal	12.438.679.835
15	Kab. Klaten	6.575.667.327
16	Kab. Kudus	48.920.782.806
17	Kab. Magelang	5.393.185.748
18	Kab. Pati	2.842.279.114
19	Kab. Pekalongan	2.366.027.972
20	Kab. Pemalang	2.804.866.882
21	Kab. Purbalingga	2.671.092.448
22	Kab. Purworejo	2.656.705.507
23	Kab. Rembang	2.397.560.556
24	Kab. Semarang	2.819.478.250
25	Kab. Sragen	2.443.426.132

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
26	Kab. Sukoharjo	2.761.755.953
27	Kab. Tegal	2.665.153.988
28	Kab. Temanggung	13.680.443.045
29	Kab. Wonogiri	2.393.480.907
30	Kab. Wonosobo	4.291.060.958
31	Kota Magelang	2.368.318.597
32	Kota Pekalongan	2.808.884.597
33	Kota Salatiga	2.712.511.435
34	Kota Semarang	4.878.333.702
35	Kota Surakarta	2.461.447.082
36	Kota Tegal	2.364.382.332
X	Total Provinsi Jawa Tengah	258.604.317.572
1	Provinsi D.I. Yogyakarta	4.929.399.650
2	Kab. Bantul	3.286.266.425
3	Kab. Gunung Kidul	1.643.133.226
4	Kab. Kulon Progo	2.464.699.800
5	Kab. Sleman	2.300.386.500
6	Kota Yogyakarta	1.807.446.525
XI	Total Provinsi D.I. Yogyakarta	16.431.332.126
1	Provinsi Jawa Timur	184.035.410.285
2	Kab. Bangkalan	4.942.766.381
3	Kab. Banyuwangi	5.198.444.381
4	Kab. Blitar	8.339.292.381
5	Kab. Bojonegoro	16.559.997.381
6	Kab. Bondowoso	8.506.569.381
7	Kab. Gresik	5.048.412.381
8	Kab. Jember	9.090.897.381
9	Kab. Jombang	8.869.971.381
10	Kab. Kediri	41.397.175.381
11	Kab. Lamongan	7.648.431.381

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
12	Kab. Lumajang	5.904.245.381
13	Kab. Madiun	6.007.128.381
14	Kab. Magetan	5.537.661.381
15	Kab. Malang	26.925.980.381
16	Kab. Mojokerto	6.428.607.381
17	Kab. Nganjuk	8.898.474.381
18	Kab. Ngawi	7.805.028.381
19	Kab. Pacitan	5.621.838.381
20	Kab. Pamekasan	18.939.623.381
21	Kab. Pasuruan	40.002.123.381
22	Kab. Ponorogo	5.943.914.381
23	Kab. Probolinggo	10.797.565.381
24	Kab. Sampang	6.437.724.381
25	Kab. Sidoarjo	9.804.941.381
26	Kab. Situbondo	5.672.787.381
27	Kab. Sumenep	13.634.522.381
28	Kab. Trenggalek	5.680.068.381
29	Kab. Tuban	6.337.078.381
30	Kab. Tulungagung	11.018.576.381
31	Kota Blitar	5.606.245.381
32	Kota Kediri	42.018.903.279
33	Kota Madiun	5.035.077.381
34	Kota Malang	18.042.709.381
35	Kota Mojokerto	5.616.744.381
36	Kota Pasuruan	5.738.337.381
37	Kota Probolinggo	4.955.993.381
38	Kota Surabaya	14.203.788.381
39	Kota Batu	5.198.311.381
XII	Total Provinsi Jawa Timur	613.451.367.661
1	Provinsi Kalimantan Tengah	482.294.309

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
2	Kab. Barito Selatan	37.099.562
3	Kab. Barito Utara	37.099.562
4	Kab. Kapuas	37.099.562
5	Kab. Kotawaringin Barat	37.099.562
6	Kab. Kotawaringin Timur	37.099.562
7	Kota Palangkaraya	37.099.562
8	Kab. Barito Timur	37.099.562
9	Kab. Murung Raya	37.099.562
10	Kab. Pulang Pisau	643.059.079
11	Kab. Gunung Mas	37.099.562
12	Kab. Lamandau	37.099.562
13	Kab. Sukamara	37.099.562
14	Kab. Katingan	37.099.562
15	Kab. Seruyan	37.099.562
XIII	Total Provinsi Kalimantan Tengah	1.607.647.694
1	Provinsi Kalimantan Selatan	577.420.703
2	Kab. Banjar	48.118.391
3	Kab. Barito Kuala	48.118.391
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	48.118.391
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	48.118.391
6	Kab. Hulu Sungai Utara	48.118.391
7	Kab. Kota Baru	48.118.391
8	Kab. Tabalong	48.118.391
9	Kab. Tanah Laut	48.118.391
10	Kab. Tapin	48.118.391
11	Kota Banjar Baru	48.118.391
12	Kota Banjarmasin	769.894.270
13	Kab. Balangan	48.118.391
14	Kab. Tanah Bumbu	48.118.391

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
XIV	Total Provinsi Kalimantan Selatan	1.924.735.665
XV	Total Provinsi Kalimantan Timur	1.567.975.705
1	Provinsi Sulawesi Selatan	2.278.247.856
2	Kab. Bantaeng	98.410.553
3	Kab. Barru	128.369.164
4	Kab. Bone	719.180.841
5	Kab. Bulukumba	94.926.994
6	Kab. Enrekang	94.926.994
7	Kab. Gowa	94.926.994
8	Kab. Jeneponto	94.926.994
9	Kab. Luwu	94.926.994
10	Kab. Luwu Utara	94.926.994
11	Kab. Maros	94.926.994
12	Kab. Pangkajene Kepulauan	94.926.994
13	Kab. Pinrang	94.926.994
14	Kab. Selayar	94.926.994
15	Kab. Sidenreng Rappang	94.926.994
16	Kab. Sinjai	407.053.917
17	Kab. Soppeng	1.809.164.832
18	Kab. Takalar	94.926.994
19	Kab. Tana Toraja	94.926.994
20	Kab. Wajo	207.027.220
21	Kota Pare-pare	94.926.994
22	Kota Makassar	332.946.238
23	Kota Palopo	94.926.994
24	Kab. Luwu Timur	94.926.994
25	Kab. Toraja Utara	94.926.994
XVI	Total Provinsi Sulawesi Selatan	7.594.159.519
1	Provinsi Bali	2.404.625.929
2	Kab. Badung	267.180.658

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
3	Kab. Bangli	285.455.815
4	Kab. Buleleng	3.162.029.656
5	Kab. Gianyar	549.323.434
6	Kab. Jembrana	267.180.658
7	Kab. Karangasem	278.081.629
8	Kab. Klungkung	267.180.658
9	Kab. Tabanan	267.180.658
10	Kota Denpasar	267.180.658
XVII	Total Provinsi Bali	8.015.419.753
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	32.814.826.770
2	Kab. Bima	5.628.627.678
3	Kab. Dompu	2.849.995.581
4	Kab. Lombok Barat	8.071.728.593
5	Kab. Lombok Tengah	10.892.430.992
6	Kab. Lombok Timur	32.860.671.369
7	Kab. Sumbawa	5.551.997.214
8	Kota Mataram	4.859.553.095
9	Kota Bima	1.738.007.857
10	Kab. Sumbawa Barat	1.323.744.877
11	Kab. Lombok Utara	2.791.171.875
XVIII	Total Provinsi Nusa Tenggara Barat	109.382.755.901
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	675.437.420
2	Kab. Alor	35.549.338
3	Kab. Belu	47.399.117
4	Kab. Ende	35.549.338
5	Kab. Flores Timur	35.549.338
6	Kab. Kupang	35.549.338
7	Kab. Lembata	35.549.338
8	Kab. Manggarai	35.549.338
9	Kab. Ngada	35.549.338

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
10	Kab. Sikka	853.184.109
11	Kab. Sumba Barat	35.549.338
12	Kab. Sumba Timur	35.549.338
13	Kab. Timor Tengah Selatan	35.549.338
14	Kab. Timor Tengah Utara	35.549.338
15	Kota Kupang	35.549.338
16	Kab. Rote Ndao	35.549.338
17	Kab. Manggarai Barat	35.549.338
18	Kab. Nagekeo	35.549.338
19	Kab. Sumba Barat Daya	35.549.338
20	Kab. Sumba Tengah	35.549.338
21	Kab. Manggarai Timur	35.549.338
22	Kab. Sabu Raijua	35.549.338
XIX	Total Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.251.458.068
Total		1.118.499.999.975

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI